

Polri Paling Banyak Diadukan pada 2017

KORAN TEMPO, 23 JAN 18



JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan Kepolisian RI kembali menjadi pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun lalu. Dari jumlah total 5.387 laporan yang diterima Komnas, sebanyak 565 aduan di antaranya menuding Polri bekerja tak sesuai dengan prinsip dan nilai HAM.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik,

mendesak Polri meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatnya. Tugas yang paling disoroti adalah penanganan kasus pelaporan publik yang lamban. “Masyarakat mengadu (ke Polri) tetapi tindak lanjut pengaduannya belum diperjelas,” kata Taufan di kantornya, kemarin.

Taufan memaparkan data pengaduan publik tersebut ketika menyampaikan tantangan pema-

juan dan penegakan HAM 2018. Proyeksi ini pertama kali dilakukan komisioner Komnas HAM periode 2017–2022 yang baru terpilih pada awal Oktober lalu.

Berdasarkan data Komnas HAM, sebanyak 398 aduan melaporkan lambannya Polri dalam menangani kasus. Petugas kepolisian juga diadukan masih sewenang-wenang, melakukan kekerasan, kriminalisasi, dan penyiksaan.

Menurut Taufan, perbaikan kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan tindakan yang mengedepankan HAM perlu dilakukan. “Penerapan prinsip dan nilai HAM akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri,” kata Taufan. Dia menegaskan hal serupa terhadap manajemen pemerintahan secara umum dan korporasi.

Pada 2016, Polri juga

menempati urutan teratas dalam daftar pengaduan masyarakat. Jumlah laporan tentang dugaan buruknya penghormatan hak asasi manusia oleh Korps Tri Brata—sebutan Polri—bahkan mencapai 2.290 pengaduan.

Hingga berita ini diturunkan, *Tempo* belum berhasil meminta tanggapan Polri mengenai data Komnas HAM. Namun, Rabu tiga pekan lalu,

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengakui lembaganya masih memiliki banyak kelemahan. “Termasuk layanan publik,” kata Tito saat itu se usai bertemu komisioner Ombudsman RI. Dia memastikan lembaganya akan terus memperbaiki kinerja sehingga Polri tingkat kepercayaan publik tahun ini bisa melampaui target 80 persen.